

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian suatu negara dapat berbalik arah, salah satunya berasal dari penerimaan pajak, karena pajak adalah sumber pendapatan bagi negara, karena 85% pendapatan dan penerimaan negara adalah berasal dari pajak, baik pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai dan pajak-pajak lainnya. sementara di sisi lain pajak merupakan beban bagi perusahaan karena beban pajak mengurangi laba perusahaan. Beban pajak terletak pada wajib pajak, khususnya pembayaran pajak badan bagi perusahaan, sehingga perencanaan yang efektif diperlukan untuk teknik pengendalian yang penting untuk profitabilitas. Menurut Nur Hidayat (2013) menjelaskan bahwa perencanaan pajak adalah strategi dalam upaya menurunkan jumlah pajak yang terutang secara legal. Sehingga dalam perencanaan pajak tersebut perusahaan akan tetap bisa mengembangkan bisnisnya dan bersaing dengan perusahaan lain.

PT. Bonecom Tricom merupakan salah satu wajib pajak badan yang bergerak di bidang manufactur. PT. Bonecom Tricom sudah beroperasi sejak tahun 2009 hingga saat ini. Kewajiban perpajakan PT Bonecom Tricom antara lain adalah berkaitan dengan pajak penghasilan baik perorangan maupun badan. Sesuai Peraturan dirjen pajak nomor PER-331/PJ/2012 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26 yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan

pribadi atau individu. Perhitungan PPh pasal 21 karyawan PT Bonecom Tricom menggunakan metode gross, yaitu untuk pemotongan PPh pasal 21 yang ditanggung kepada karyawan. Namun tidak seluruh karyawan menggunakan metode gross, khususnya untuk *team management* dalam perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode gross up, yaitu pajak penghasilan yang ditanggung oleh perusahaan. Jika perusahaan menggunakan kedua metode tersebut saat ini, maka dengan cara perhitungan tersebut perusahaan sudah melakukan pengeluaran pajak secara efisien, karena dengan metode gross perusahaan tidak ditanggung oleh biaya pajak penghasilan pasal 21 karyawan.

Dengan penggunaan metode gross tersebut karyawan akan mendapatkan potongan sejumlah dengan PPh pasal 21 yang sudah dihitung, sehingga dapat mengurangi *take home pay* yang diterima oleh karyawan tersebut. Agar semua pihak yaitu perusahaan ataupun karyawan mendapatkan manfaat, maka diperlukan perencanaan pajak untuk menghitung PPh pasal 21 dengan cara yang legal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Perencanaan pajak untuk menghitung PPh Pasal 21 dapat menggunakan 3 metode alternatif. Menurut Pohan (2018) menghitung PPh 21 ada 3 alternatif yang dapat digunakan yaitu, pertama adalah PPh pasal 21 yang ditanggung oleh karyawan itu sendiri (*gross method*), kedua PPh pasal 21 yang ditanggung kepada pemberi kerja (*net basis*), dan ketiga adalah metode gross up maka PPh Pasal 21 akan diberikan dalam bentuk tunjangan. Dari alternatif tersebut metode manakah yang paling efisien untuk digunakan dalam perhitungan

pajak PPh pasal 21 bagi perusahaan, dan juga memperhatikan benefit bagi karyawannya.

Rahayu (2017) Perencanaan pajak adalah proses dimana wajib pajak baik perorangan maupun badan usaha menerapkan langkah-langkah penghematan pajak. Menurut Pohan (2018) Tax Planning adalah suatu tindakan perencanaan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan sebagai wajib pajak badan dengan sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, termasuk pajak penghasilan maupun pajak lainnya sedikit mungkin, selama hal tersebut legal yaitu tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya perencanaan pajak, maka bisa menjadi salah satu strategi yang bisa digunakan oleh perusahaan dalam mengefisiensikan pengeluaran pajak perusahaan.

Bagi perusahaan, PPh Pasal 21 yang dipungut terhadap penghasilan yang diterima ataupun diperoleh dapat dianggap sebagai biaya atau pengeluaran yang berkaitan dengan menjalankan bisnis dan terlibat dalam kegiatan lainnya. Sehingga manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan mampu mengurangi pengeluaran atau biaya pajak. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa besarnya beban pajak PPh pasal 21 adalah bergantung dengan besarnya penghasilan. Bahwa semakin besar penghasilan maka akan semakin besar beban pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak.

Bersadarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT Bonecom Tricom Sebagai Strategi dalam Efisiensi Pajak Perusahaan** “

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian masalah yang di atas, maka masalah yang akan dibahas yaitu :

1. Apakah perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT Bonecom Tricom sudah sesuai dengan Undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku ?
2. Apakah Metode yang digunakan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT Bonecom Tricom sudah efisien bagi pajak perusahaan ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pembahasan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sesuai dengan Undang – undang dan peraturan perpajakan yang berlaku.
- b. Untuk menganalisis Pengaruh Penerapan Perencanaan pajak penghasilan Pasal 21 dengan metode perhitungan yang tepat sebagai strategi yang dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan efisiensi pajak perusahaan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi berbagai pihak yaitu :

- a. Kegunaan Teoritis

Dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi para peneliti selanjutnya yang lebih baik dan menambah wawasan serta memperdalam ilmu pengetahuan khususnya mengenai perpajakan.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi di Universitas Satya Negara Indonesia. Serta untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam mengaplikasikan mengenai pengetahuan Pajak penghasilan pasal 21.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan bisa membantu memberikan informasi bagi PT Bonecom Tricom terkait metode perhitungan Pajak penghasilan pasal 21, serta dapat memberikan pengetahuan dalam strategi perusahaan dalam efisiensi pajak perusahaan.

3. Bagi Pembaca

Sebagai informasi untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan terkait dengan Pajak penghasilan pasal 21 sebagai wajib pajak pribadi, serta memberikan pengembangan pengetahuan dalam perencanaan pajak sesuai dengan aturan Undang – Undang dan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.